ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) SEBAGAI LEMBAGA NEGARA

Nurlaili Widya Ayuningtyas¹, Mushafi Miftah²

Ilmu Hukum, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid¹

Dosen, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid²

Email: nurlailiwidyaayuningtyas@gmail.com¹, mushafimiftah@unuja.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam sistem pemerintahan Indonesia serta relevansinya bagi demokrasi konstitusional. Sebagai pengawas pemilu, Bawaslu berperan menjaga integritas pemilu yang jujur dan adil, namun belum diatur secara eksplisit dalam UUD 1945, sehingga memunculkan perdebatan legitimasi. Menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa Bawaslu, meski tidak dibentuk langsung oleh konstitusi, merupakan organ negara yang menjalankan fungsi pengawasan dan penyelesaian sengketa secara quasi-yudisial. Sebagai lembaga independen di luar eksekutif, legislatif, dan yudikatif, Bawaslu berfungsi sebagai mekanisme checks and balances. Disarankan penguatan kedudukannya dalam konstitusi demi efektivitas pengawasan pemilu ke depan.

Kata kunci : Bawaslu, Lembaga Negara, Pemilu

Abstract

This study analyzes the position of the General Elections Supervisory Agency (Bawaslu) within the Indonesian government system and its relevance to constitutional democracy. As an election supervisor, Bawaslu plays a role in maintaining the integrity of honest and fair elections, but this is not explicitly regulated in the 1945 Constitution, giving rise to debates about its legitimacy. Using normative legal methods with a statutory and conceptual approach, this study finds that Bawaslu, although not directly established by the constitution, is a state organ that carries out supervisory and dispute resolution functions in a quasi-judicial manner. As an independent institution outside the executive, legislative, and judicial branches, Bawaslu functions as a mechanism of checks and balances. It is recommended that its position in the constitution be strengthened for the effectiveness of future election oversight.

Keywords: Bawaslu, State Institution, Election

A. Pendahuluan

Indonesia menganut sistem demokrasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 6A Ayat (1) yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Dalam demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat, sehingga rakyat memegang kekuasaan tertinggi. Sebagai negara hukum yang

berdaulat dan demokratis, salah satu wujud kedaulatan rakyat adalah melalui penyelenggaraan Pemilihan Umum.¹

Pemilu merupakan sarana utama dalam sistem demokrasi Indonesia untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Melalui pemilu, rakyat menyalurkan hak pilihnya guna menentukan pemimpin dan wakil rakyat yang memiliki legitimasi dalam menjalankan pemerintahan.² Sebagai instrumen penting demokrasi, pemilu memerlukan pengawasan agar pelaksanaannya tetap sesuai prinsip jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia.³

Sejak reformasi 1998⁴, penyelenggaraan Pemilu di Indonesia mengalami perkembangan signifikan dengan lahirnya berbagai lembaga baru untuk memperkuat demokrasi, salah satunya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai pengawas pelaksanaan Pemilu.

Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, Pasal 1 angka 7 UU No. 7 Tahun 2017 membagi lembaga penyelenggara Pemilu menjadi tiga, yaitu: Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). KPU, sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945, merupakan lembaga nasional, tetap, dan mandiri yang bertanggung jawab menyelenggarakan Pemilu di seluruh wilayah NKRI.⁵

Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) adalah badan yang bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan Pemilu di seluruh wilayah Indonesia.⁶ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah lembaga yang menangani pelanggaran terhadap kode etik dalam penyelenggaraan Pemilu.⁷ Ketiga lembaga tersebut hadir demi mewujudkan Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil yang sering disebut dengan Luberjudil.⁸

Keberadaan Bawaslu sebagai pengawas pemilu menimbulkan pertanyaan tentang kedudukannya sebagai lembaga negara yang memiliki wewenang besar namun belum sepenuhnya diakui secara hukum sebagai lembaga independen. Penting untuk menganalisis kedudukan hukumnya serta memastikan Bawaslu dapat bekerja bebas dari tekanan politik dan memiliki akses memadai terhadap instrumen hukum demi menjalankan tugasnya secara efektif.

¹ Puput Sari Puspita and Arfa'i Arfa'i, 'Analisis Terhadap Kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia', *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 3.1 (2023), 1–21 <<https://doi.org/10.22437/limbago.v3i1.20115>>.

² Dkk Siagian, Abdhy Walid, 'Tinjauan Yuridis Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Pasca Penetapan Suara Nasional Oleh Komisi Pemilihan Umum', *Jurnal Aphtn-Han*, 1.2022 (2022), 157–58

³ Muhamad Raihan Husaini and others, 'Peran Badan Pengawasan Pemilu Dalam Penanggulangan Pelanggaran Pemilihan Umum Di Era Digital Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum', *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, 1.3 (2024), 153–69 <<https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i3.264>>.

⁴ Erna Octavia and Muhammad Anwar, 'JKPN Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pontianak Dalam Menjalankan Pengawasan Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah TAHUN 2024', 8 (2024), 288–97.

⁵ Pasal 1 angka 8 UU Nomor 7 Tahun 2017

⁶ Pasal 1 angka 17 UU Nomor 7 Tahun 2017

⁷ Pasal 1 angka 24 UU Nomor 7 Tahun 2017

⁸ Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 2027

Menurut Kurniawan (2019), meskipun Bawaslu memiliki peran strategis dalam demokrasi, pengakuan dan perlindungan terhadap lembaga ini dalam sistem hukum Indonesia masih kurang memadai. Pemahaman mengenai kedudukan Bawaslu dalam tatanan kelembagaan negara penting untuk memperkuat legitimasi dan efektivitasnya dalam menjalankan pengawasan pemilu secara objektif dan independen. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berjudul "Analisis Yuridis Kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai Lembaga Negara" dengan tujuan memberikan kontribusi bagi penguatan sistem pengawasan pemilu yang lebih efektif di masa depan.

B. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah langkah-langkah sistematis untuk melaksanakan penelitian. Karena teknik penelitian melibatkan evaluasi literatur yang menghasilkan analisis hukum, teknik ini menjadi alat penting dalam proses penelitian. Menurut Muhaimin, metodologi berasal dari kata metode (cara teratur) dan logi (ilmu).⁹

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai sistem norma dengan menelusuri bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin ahli.¹⁰

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki¹¹, yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, untuk memahami kedudukan Bawaslu sebagai lembaga negara secara komprehensif. Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum menjadi dasar utama untuk menjawab rumusan masalah secara yuridis. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum meliputi primer, sekunder, dan tersier, yang digunakan secara komplementer untuk membangun argumentasi hukum yang utuh dan dapat dipertanggungjawabkan.¹²

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sebagai pendekatan utama penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian ini tidak menggunakan data empiris, melainkan sumber hukum tertulis yang relevan. Prosesnya meliputi identifikasi, penelusuran, dan pengumpulan dokumen hukum otoritatif maupun interpretatif sebagai dasar analisis yuridis.¹³

Dokumen yang dikaji mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, buku ajar hukum, dan tulisan akademik lainnya, baik cetak maupun digital. Peneliti mengakses UUD 1945 dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu melalui situs resmi JDIH, serta merujuk literatur pakar hukum tata negara seperti Jimly Asshiddiqie dan Maria Farida. Jurnal dari SINTA, Garuda, Google Scholar, dan repositori universitas digunakan untuk memperluas perspektif

⁹ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum Nusa Tenggara Barat", Mataram University Press, 2020, hlm. 30

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021). 35.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *ibid.* 93-96.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *ibid.* 141-143

¹³ Husaini et al. metode dan pendekatan hukum terbaru, *Jurnal Demokrasi*, (2024),

akademik terkait kedudukan dan kewenangan Bawaslu. Semua bahan dipilih secara selektif agar mendukung argumentasi yuridis yang logis dan relevan. Teknik ini memungkinkan pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara kredibel, menjadi dasar konstruksi hukum yang utuh dalam menjawab permasalahan posisi Bawaslu dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Analisis dokumen adalah metode untuk mengumpulkan, membaca, memahami, dan menafsirkan dokumen tertulis seperti peraturan, putusan pengadilan, jurnal, dan buku hukum yang relevan. Metode ini membantu menemukan logika hukum, penafsiran norma, dan penerapan konsep hukum. Pendekatan deduktif digunakan dengan menarik kesimpulan dari kaidah umum ke kasus khusus.¹⁴

C. Hasil dan Pembahasan

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memegang peranan penting dalam sistem demokrasi Indonesia.¹⁵ Keberadaan lembaga ini bukan hanya sekadar pelengkap dalam penyelenggaraan pemilu, tetapi lebih jauh, menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas demokrasi.¹⁶

Dalam perjalanan demokrasi Indonesia, pelaksanaan pemilu yang bebas, jujur, dan adil merupakan fondasi utama bagi terbentuknya pemerintahan yang sah dan dipercaya oleh rakyat.¹⁷ Bawaslu hadir untuk memastikan bahwa seluruh proses pemilu berlangsung secara transparan, akuntabel, serta bebas dari kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan.¹⁸

Oleh karena itu, penting untuk menelaah lebih dalam kedudukan Bawaslu secara hukum dan kelembagaan,¹⁹ agar dapat dilihat sejauh mana kekuatan legal serta urgensi penguatan kelembagaan ini dalam tatanans sistem pemerintahan Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 22E ayat (5), menyebutkan bahwa²⁰: “*Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.*”

Meskipun hanya menyebut KPU secara eksplisit, penafsiran sistemik menunjukkan perlunya pengawasan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Karena itu, Bawaslu hadir sebagai pelengkap dengan tugas berbeda, yaitu

¹⁴ Wiwik Sri Widiarty, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024). 131.

¹⁵ Mardani, S. (2022). Lembaga Negara dan Kemandirian Bawaslu dalam Sistem Pemerintahan. Yogyakarta: Penerbit Universitas, hlm. 17.

¹⁶ Suharno, T. (2021). Integritas Pemilu dan Peran Bawaslu. Bandung: Penerbit Hukum, hlm. 56

¹⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22E ayat (1) dan (2).

¹⁸ Bawaslu RI. (2019). *Laporan Akhir Pengawasan Pemilu 2019*. Jakarta: Bawaslu, hlm. 3.

¹⁹ Hardin, D. R. (2020). *Kemandirian dan Legitimasi Bawaslu sebagai Lembaga Pengawas Pemilu*. Skripsi, Universitas Jenderal Soedirman, hlm. 22.

²⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22E ayat (5)

mengawasi secara menyeluruh demi menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah penyimpangan demokrasi.²¹

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan legitimasi eksplisit mengenai kedudukan, struktur, tugas, dan wewenang Bawaslu. Beberapa ketentuan penting dalam undang-undang ini yang memperkuat dasar hukum Bawaslu adalah:

a. Pasal 1 angka 22 yang menjelaskan bahwa:

*“Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”*²²

b. Pasal 2 menyebutkan asas pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta Pasal 3 tentang prinsip keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan profesionalitas yang hanya dapat ditegakkan jika ada pengawasan yang memadai.

c. Pasal 93 - Pasal 107 secara terperinci mengatur tentang:

- 1) Struktur kelembagaan Bawaslu
- 2) Fungsi dan tugas pengawasan
- 3) Mekanisme pencegahan dan penindakan pelanggaran
- 4) Penyelesaian sengketa proses pemilu.

Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemilu, Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemilu menetapkan mekanisme teknis pelaksanaan tugas pengawasan pemilu. Peraturan ini membuktikan bahwa Bawaslu bukan hanya tunduk pada norma yang bersifat normatif, tetapi juga memiliki instrumen regulasi internal sebagai pelaksanaan tugas dan kewenangan. Peraturan ini mencakup berbagai aspek, seperti:²³

- a. Prosedur pengawasan,
- b. Mekanisme pelaporan pelanggaran,
- c. Penanganan sengketa, dan
- d. Tindakan pencegahan pelanggaran.

Dengan demikian, Bawaslu memiliki dasar hukum yang kuat, mulai dari UUD 1945, UU No. 7 Tahun 2017, hingga putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan internal. Meskipun tidak disebut eksplisit dalam UUD 1945, keberadaannya penting untuk memastikan prinsip check and balance dalam penyelenggaraan pemilu.

Dalam ketatanegaraan modern, dikenal konsep *independent state institutions*, yaitu lembaga yang tidak berada di bawah legislatif, eksekutif, atau yudikatif, melainkan berfungsi mengawasi jalannya kekuasaan negara.²⁴ Jimly Asshiddiqie menyebutnya sebagai “cabang kekuasaan keempat” dalam sistem trias politika Indonesia. Dalam kerangka ini, Bawaslu hadir sebagai lembaga mandiri yang berperan strategis menjaga integritas pemilu dan demokrasi di Indonesia.²⁵

²¹ Hardin, D. R. (2022). Kedudukan Bawaslu dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

²² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 angka 22

²³ Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemilu.

²⁴ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Konstitusi Press, 2022

²⁵ Asshiddiqie, J. (2021). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Cet. Ke-8). Jakarta: Rajawali Pers.

Dalam Pasal 1 angka 22 yang menyebutkan bahwa: "Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia."²⁶

Karakteristik kedua yang memperkuat status independennya adalah fungsi quasi-yudisial. Dalam Pasal 102 hingga 107 UU Pemilu, Bawaslu diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui mekanisme mediasi dan adjudikasi.²⁷ Ini berarti bahwa Bawaslu tidak hanya melakukan pengawasan administratif, tetapi juga menjalankan fungsi penegakan hukum administratif dalam lingkup pemilu.²⁸

Keputusan yang diambil oleh Bawaslu bersifat final dan mengikat dalam wilayah hukum administratif, dan ini memberikan Bawaslu kapasitas untuk menjadi aktor kunci dalam penyelesaian sengketa politik elektoral secara legal dan bermartabat.²⁹

Bawaslu bersifat independen dan tidak tunduk pada kekuasaan lain dalam menjalankan tugasnya, termasuk menyusun peraturan, anggaran, dan proses seleksi internal melalui mekanisme uji kelayakan oleh DPR. Meski demikian, Bawaslu tetap berada dalam sistem checks and balances, dengan laporan keuangan diaudit BPK dan perilaku etik diawasi DKPP.³⁰

Keunggulan lain Bawaslu adalah struktur organisasinya yang desentralistik hingga menjangkau lapisan terbawah masyarakat. Jaringan ini berjenjang mulai dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi (Pasal 105), Bawaslu Kabupaten/Kota (Pasal 106), Panwaslu Kecamatan, hingga Pengawas TPS. Dengan struktur ini, pengawasan pemilu dapat dilakukan secara masif, terkoordinasi, dan responsif terhadap dinamika lokal.³¹

Struktur pengawasan Bawaslu yang menjangkau hingga tingkat desa mencerminkan komitmen pada fungsi yang partisipatif dan kolaboratif. Pengawas di lapangan tidak hanya memantau teknis pelaksanaan, tetapi juga menjaga kondusifitas dan mendeteksi pelanggaran sejak dini. Karakteristik ini menegaskan bahwa Bawaslu layak dikategorikan sebagai lembaga negara independen.³²

Status ini penting karena menegaskan posisi Bawaslu sebagai lembaga netral, objektif, dan dipercaya publik dalam menjaga kualitas demokrasi. Netralitasnya menjadi kunci agar pemilu menghasilkan pemimpin yang legitimate dan sesuai aspirasi rakyat. Bawaslu mengawasi seluruh tahapan pemilu dari verifikasi daftar pemilih hingga penetapan hasil sebagai upaya nyata mencegah pelanggaran dan manipulasi, bukan sekadar formalitas.³³ Melalui edukasi publik dan sosialisasi

²⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 angka 22.]

²⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 102–107.

²⁸ Harfia, T. P. (2021). *Analisis Yuridis Kedudukan Bawaslu Sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Limbago: Journal of Constitutional Law.

²⁹ Suharno, T. (2021). *Integritas Pemilu dan Peran Bawaslu*. Bandung: Penerbit Hukum, hlm. 44.

³⁰ Bawaslu RI. (2020). *Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemilu*.

³¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 105 dan Pasal 106.

³² Suharno, T. (2021). *Integritas Pemilu dan Peran Bawaslu*. Bandung: Penerbit Hukum.

³³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2022

regulasi pemilu, Bawaslu mencegah pelanggaran dengan program seperti “Sadar Pemilu” dan “Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif” yang memperkuat kesadaran hukum dan hak politik masyarakat.³⁴ Bawaslu berwenang menyelesaikan konflik pemilu melalui mediasi atau adjudikasi, sehingga berperan sebagai pengawas sekaligus penengah hukum demi keadilan pemilu.³⁵

Secara keseluruhan, Bawaslu sebagai lembaga independen berperan penting menjaga kepercayaan publik terhadap demokrasi. Dukungan hukum, struktur luas, dan kewenangan jelas menjadikannya pilar pengawasan pemilu. Penguatan konstitusional dan kelembagaan Bawaslu menjadi langkah strategis demi terwujudnya pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.³⁶

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bukan sekadar pelengkap pelaksanaan pemilu, melainkan pilar utama yang menjamin proses demokrasi berlangsung jujur, adil, dan bermartabat. Tugasnya tidak hanya administratif, tetapi menyentuh substansi demokrasi melalui pengawasan, pencegahan, penindakan, penyelesaian sengketa, serta menjaga stabilitas politik.

a. Fungsi Pengawasan (Pasal 93–95 UU Pemilu)

Bawaslu mengawasi seluruh tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih hingga penetapan hasil³⁷, melalui: Pemantauan langsung oleh pengawas dari pusat hingga TPS, Pemanfaatan teknologi pelaporan daring, Pelibatan masyarakat dalam pengawasan, Fungsi ini memastikan prinsip jujur dan adil terlaksana.

b. Fungsi Pencegahan (Pasal 93 ayat 2)

Bawaslu mencegah pelanggaran melalui edukasi dan sosialisasi, seperti program Sadar Pemilu dan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif, yang membangun kesadaran publik serta melatih masyarakat menjadi pengawas aktif.³⁸

c. Fungsi Penindakan (Pasal 96–101)

Bawaslu memproses laporan pelanggaran, menjatuhkan sanksi administratif, dan menangani pelanggaran pidana bersama Gakkumdu yang melibatkan kepolisian serta kejaksaan, demi penegakan hukum yang tegas dan profesional.³⁹

d. Fungsi Penyelesaian Sengketa (Pasal 102–107)

Bawaslu menyelesaikan sengketa antarpeserta atau dengan penyelenggara melalui mediasi dan adjudikasi, dengan putusan administratif yang mengikat, guna menjaga keadilan dan efisiensi proses pemilu.⁴⁰

e. Fungsi Politik dan Demokrasi

³⁴ Bawaslu RI. (2019). *Laporan Akhir Pengawasan Pemilu 2019*, hlm. 32.

³⁵ Tambunan, M. T. (2020). *Evaluasi Yuridis terhadap Peran Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu*. Skripsi, Universitas Sumatera Utara, hlm. 57.

³⁶ Mardani, S. (2022). *Lembaga Negara dan Kemandirian Bawaslu dalam Sistem Pemerintahan*. Yogyakarta: Penerbit Universitas, hlm. 65.

³⁸ Bawaslu RI. (2020). *Laporan Kinerja Bawaslu Tahun 2020*, hlm. 36.

³⁹ Taksil, A. Gunawan, ‘Pengawasan Partisipatif Bawaslu Berbasis Digital Melalui Aplikasi Siwaslu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Bone’, Skripsi, 1, 2024, 1–101

⁴⁰ Tambunan, M. T. (2020). *Evaluasi Yuridis terhadap Peran Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu*. Skripsi, Universitas Sumatera Utara, hlm. 59.

Bawaslu menjaga kepercayaan publik terhadap hasil pemilu, mencegah konflik, dan memperkuat legitimasi pemerintahan, sehingga stabilitas politik dan institusi demokrasi tetap terjaga.⁴¹

Dengan fungsi tersebut, Bawaslu menjadi syarat mutlak bagi tegaknya sistem pemilu yang sehat. Jika pemilu adalah jantung demokrasi, Bawaslu adalah denyut nadinya yang memastikan demokrasi tetap hidup dengan teratur.

Untuk memahami posisi Bawaslu dalam sistem pemerintahan Indonesia, dapat digunakan dua teori ketatanegaraan: pemisahan kekuasaan dan lembaga negara. Keduanya menjelaskan dasar akademik dan yuridis yang menegaskan peran penting Bawaslu dalam menjaga stabilitas demokrasi.⁴²

Teori pemisahan kekuasaan Montesquieu membagi kekuasaan negara menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berpotensi menimbulkan tirani, sekaligus menjaga check and balances antar lembaga negara.⁴³ Dari perspektif teori pemisahan kekuasaan, Bawaslu berperan vital menjaga keseimbangan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam pemilu.

Selain pemisahan kekuasaan, keberadaan Bawaslu dapat dilihat melalui teori lembaga negara yang menyoroti pembentukan, kedudukan, dan legitimasi institusi. Teori ini memandang lembaga negara lahir dari kebutuhan konstitusional dan hukum untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif dan akuntabel. Umumnya, lembaga negara dibagi menjadi tiga:⁴⁴

- a. Utama (Presiden, DPR, MA)
- b. Pendukung (LAN, Arsip Nasional)
- c. Independen (KPU, Bawaslu, KY, KPK)

Bawaslu, sebagai lembaga yang berwenang mengawasi pemilu, memiliki peran strategis dalam menyelesaikan sengketa, sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017. Namun, pelaksanaannya masih terkendala faktor hukum dan kelembagaan, sehingga diperlukan evaluasi normatif untuk menilai efektivitas dan kekuatan Bawaslu dalam sistem hukum Indonesia.⁴⁵

Secara keseluruhan, penanganan sengketa pemilu oleh Bawaslu masih terhambat kekosongan hukum yang melemahkan fungsi adjudikatifnya, sehingga perlu penguatan posisi hukum agar efektif dan berlegitimasi dalam menghadapi dinamika politik.⁴⁶

⁴¹ Lea Cristiani and others, 'Peran Bidang Administrasi Bawaslu RI Dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja Dan Pelayanan Pengawasan Pemilu', *Populika*, 12.1 (2024), 87–97 \

⁴² Syaiful Mardani, *Lembaga Negara dan Kemandirian Bawaslu dalam Sistem Pemerintahan*, Yogyakarta: Penerbit Universitas, 2022

⁴³ Muhammad Mutawalli and Zuhilmi Paidi, 'Prinsip Periodik Dalam Pemilihan Umum : Orientasi Dan Implikasinya Di Indonesia', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23.1 (2023), 357–74.

⁴⁴ Syaiful Mardani, *Lembaga Negara dan Kemandirian Bawaslu dalam Sistem Pemerintahan*, Yogyakarta: Penerbit Universitas, 2022

⁴⁵ Abdhy Walid, 'Jurisdiction Overview of the Authority of the General Election Supervisory Agency in Handling Violations of Election Administration Post Voting By the National Election Commission', *Jurnal APHTN-HAN*, 1.2022 (2022), 157–58.

⁴⁶ Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cet. ke-8, Jakarta: Rajawali Pers, 2021, hlm. 152.

Kehadiran Bawaslu bukan sekadar pelengkap penyelenggara pemilu, melainkan garda terdepan penjaga integritas demokrasi. Pemilu adalah perwujudan kedaulatan rakyat sesuai Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, sehingga lembaga pengawasnya harus kuat dan merdeka, bukan sekadar administratif. Dengan jangkauan hingga tingkat desa, Bawaslu mengemban prinsip keadilan, keterbukaan, dan legitimasi politik. Namun, kompleksitas pemilu menuntut penguatan kelembagaan agar kewenangan Bawaslu sepadan dengan tanggung jawabnya.⁴⁷

Penguatan kelembagaan Bawaslu merupakan kebutuhan mendesak untuk memperkuat demokrasi konstitusional di Indonesia.⁴⁸ Reformasi yang diperlukan meliputi:

1. Menetapkan Bawaslu sebagai entitas konstitusional setara Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial untuk memperkuat legitimasi dan mencegah intervensi kekuasaan lain.
2. Menegaskan fungsi yudisial terbatas dalam konstitusi agar keputusan sengketa pemilu memiliki kekuatan hukum tetap.
3. Memastikan dukungan anggaran dan SDM memadai tanpa ketergantungan politik guna meningkatkan efektivitas kerja.
4. Membentuk unit investigasi mandiri untuk menangani pelanggaran serius secara profesional.
5. Mendorong partisipasi publik dalam pengawasan pemilu demi memperkuat legitimasi dan percepatan reformasi.

Dengan penguatan status, fungsi, dan sumber daya, Bawaslu dapat berperan sebagai lembaga independen yang menjamin pemilu berjalan jujur, adil, dan transparan.

Menetapkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga negara konstitusional merupakan langkah strategis untuk memperkuat demokrasi Indonesia. Status ini akan memberi dampak luas pada struktur ketatanegaraan, dinamika politik, dan efektivitas penegakan hukum pemilu.⁴⁹

1. Penguatan Legitimasi

Saat ini kewenangan Bawaslu bertumpu pada UU No. 7 Tahun 2017, sehingga posisinya belum setara dengan lembaga konstitusional lain seperti MK atau KPU. Dengan pengakuan konstitusional, keputusan Bawaslu akan memiliki legitimasi tertinggi, penting untuk menindak pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).⁵⁰

2. Memperkuat Checks and Balances

⁴⁷ Mardani, S. (2022). *Lembaga Negara dan Kemandirian Bawaslu dalam Sistem Pemerintahan*. Yogyakarta: Penerbit Universitas.

⁴⁸ Mardani. (2022). Bawaslu dan Posisi Konstitusionalnya dalam Sistem Demokrasi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 19(3), 412–430.

⁴⁹ Risnawati. (2021). Urgensi Penguatan Kelembagaan Bawaslu dalam Sistem Pemilu di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 55–70.

⁵⁰ Alnoviano Harjanto, “Rekonstruksi Kewenangan Bawaslu dalam Pilkada”, (2020), hlm. 6.

Sebagai lembaga negara, Bawaslu akan menjadi pilar pengimbang terhadap eksekutif dan legislatif, mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam pemilu, serta menjaga transparansi dan keadilan proses elektoral.⁵¹

3. Reformasi Rekrutmen dan Organisasi

Perubahan status menuntut rekrutmen komisioner yang transparan dan berbasis merit, serta pembentukan unit penyelidikan dan hukum mandiri agar Bawaslu memiliki kapasitas administratif dan yudikatif yang kuat.⁵²

4. Revisi Konstitusi dan UU

Diperlukan amandemen terbatas UUD 1945 untuk mengatur keberadaan dan kewenangan Bawaslu secara eksplisit, serta pembentukan UU kelembagaan tersendiri yang mengatur hubungan Bawaslu, KPU, dan DKPP.⁵³

5. Dampak terhadap Stabilitas Politik

Dengan kewenangan penuh, Bawaslu dapat meningkatkan kualitas demokrasi dan mengurangi konflik pemilu, sehingga pemilu berfungsi sebagai sarana legitimasi dan rekonsiliasi politik.

Penguatan status Bawaslu di tingkat konstitusi bukan hanya reformasi struktural, tetapi juga investasi bagi masa depan demokrasi Indonesia. Dukungan semua elemen bangsa diperlukan agar Bawaslu dapat optimal menjaga keadilan dan integritas pemilu.

Kedudukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017, namun secara yuridis-konstitusional masih memiliki kekosongan dan kelemahan.⁵⁴ Secara konstitusional, Bawaslu belum tercantum dalam UUD 1945, meskipun tugasnya terkait langsung dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan posisi dan mengurangi legitimasi dibandingkan lembaga seperti KPU atau MK yang diatur eksplisit dalam konstitusi.⁵⁵

Selain itu, kewenangan Bawaslu kerap tidak memiliki daya eksekusi langsung, karena putusannya dapat dibatalkan oleh lembaga lain dan pelaksanaannya bergantung pada instansi eksternal. Fungsi adjudikatifnya dalam penyelesaian sengketa pemilu juga belum diakui sebagai bagian dari sistem peradilan pemilu, sehingga belum memiliki kekuatan hukum setara lembaga ajudikatif mandiri seperti di India atau Meksiko.⁵⁶

Bawaslu juga rentan intervensi politik, terutama dalam rekrutmen komisioner yang dipilih DPR⁵⁷, sehingga independensinya dipertanyakan.

⁵¹ Lea Cristiani dkk., *Peran Bawaslu RI Dalam Pelayanan Pengawasan Pemilu*, Populika, Vol. 12 No. 1 (2024), hlm. 90.

⁵² Hanafi, *Juridical Analysis of Handling Violations of General Election Crimes at Bawaslu*, Voice Justisia, Vol. 7 No. 1 (2023), hlm. 10.

⁵³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020, hlm. 45.

⁵⁴ Rivai, M. (2020). *Analisis Yuridis Terhadap Efektivitas Bawaslu dalam Penegakan Hukum Pemilu*. Fakultas Hukum Universitas Riau.

⁵⁵ Risnawati. (2021). Urgensi Penguatan Kelembagaan Bawaslu dalam Sistem Pemilu di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 215–233.

⁵⁶ Yani, R. (2022). Electoral Integrity and the Role of Bawaslu: A Normative Legal Review. *Jurnal Demokrasi dan Pemerintahan*, 8(1), 45–61.

⁵⁷ Santoso, B. (2023). Independensi dan Reformasi Bawaslu dalam Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Ilmu Hukum dan Kenegaraan*, 12(2), 135–150.

Perbaikan yang disarankan:

1. Mencantumkan Bawaslu dalam UUD 1945 untuk memperkuat legitimasi dan kewenangannya.
2. Merevisi UU Pemilu guna memperjelas fungsi adjudikatif dan hubungan kelembagaannya.⁵⁸
3. Mereformasi mekanisme rekrutmen berbasis transparansi dan meritokrasi.⁵⁹

Dengan langkah-langkah tersebut, Bawaslu dapat menjalankan perannya secara lebih efektif, independen, dan mampu menjaga integritas pemilu di Indonesia.

D. Penutup

Bawaslu menempati posisi strategis sebagai lembaga negara independen (auxiliary state organ) meskipun tidak tercantum eksplisit dalam UUD 1945. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017, Bawaslu berwenang mengawasi, mencegah, menindak, dan menyelesaikan sengketa pemilu secara administratif, termasuk menjalankan fungsi quasi-yudisial. Perannya krusial dalam menjaga netralitas, mencegah kecurangan, dan menjamin keadilan elektoral. Namun, efektivitasnya masih terkendala keterbatasan kekuatan hukum, belum adanya pengakuan konstitusional, dan rendahnya partisipasi publik, sehingga penguatan kedudukan hukum dan kelembagaan menjadi kebutuhan mendesak.

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 1 angka 7, 8; Pasal 95 ayat (1) dan Pasal 99

⁵⁹ Bawaslu RI. (2019). *Laporan Akhir Pengawasan Pemilu 2019*. Jakarta: Bawaslu, hlm. 89–90.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdhy Walid, 'Jurisdiction Overview of the Authority of the General Election Supervisory Agency in Handling Violations of Election Administration Post Voting By the National Election Commission', *Jurnal APHTN-HAN*, 1.2022 (2022).
- Alnoviano Harjanto, "Rekonstruksi Kewenangan Bawaslu dalam Pilkada", (2020).
- Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Cet. Ke-8)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bawaslu RI. (2019). *Laporan Akhir Pengawasan Pemilu 2019*. Jakarta: Bawaslu.
- Bawaslu RI. (2020). *Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemilu*.
- Dkk Siagian, Abdhy Walid, 'Tinjauan Yuridis Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Pasca Penetapan Suara Nasional Oleh Komisi Pemilihan Umum', *Jurnal Aphtn-Han*, 1.2022 (2022).
- Erna Octavia and Muhammad Anwar, 'JPKN Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pontianak Dalam Menjalankan Pengawasan Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah TAHUN 2024', 8 (2024).
- Hanafi, *Juridical Analysis of Handling Violations of General Election Crimes at Bawaslu*, *Voice Justisia*, Vol. 7 No. 1 (2023).
- Hardin, D. R. (2020). *Kemandirian dan Legitimasi Bawaslu sebagai Lembaga Pengawas Pemilu*. Skripsi, Universitas Jenderal Soedirman.
- Hardin, D. R. (2022). *Kedudukan Bawaslu dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
- Harfia, T. P. (2021). *Analisis Yuridis Kedudukan Bawaslu Sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Limbago: Journal of Constitutional Law.
- Husaini et al. metode dan pendekatan hukum terbaru, *Jurnal Demokrasi*, (2024),
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2022.
- Lea Cristiani and others, 'Peran Bidang Administrasi Bawaslu RI Dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja Dan Pelayanan Pengawasan Pemilu', *Populika*, 12.1 (2024), 87–97
- Lea Cristiani dkk., *Peran Bawaslu RI Dalam Pelayanan Pengawasan Pemilu*, *Populika*, Vol. 12 No. 1 (2024).
- Mardani, S. (2022). *Lembaga Negara dan Kemandirian Bawaslu dalam Sistem Pemerintahan*. Yogyakarta: Penerbit Universitas.
- Mardani. (2022). *Bawaslu dan Posisi Konstitusionalnya dalam Sistem Demokrasi Indonesia*. *Jurnal Konstitusi*, 19(3).
- Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum Nusa Tenggara Barat", Mataram University Press, 2020.
- Muhamad Raihan Husaini and others, 'Peran Badan Pengawasan Pemilu Dalam Penanggulangan Pelanggaran Pemilihan Umum Di Era Digital Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan

- Umum', *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, 1.3 (2024), 153–69 <<https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i3.264>>.
- Muhammad Mutawalli and Zuhilmi Paidi, 'Prinsip Periodik Dalam Pemilihan Umum: Orientasi Dan Implikasinya Di Indonesia', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23.1 (2023), 357–74.
- Pasal 1 angka 17 UU Nomor 7 Tahun 2017.
- Pasal 1 angka 24 UU Nomor 7 Tahun 2017.
- Pasal 1 angka 8 UU Nomor 7 Tahun 2017.
- Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 2027.
- Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemilu.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021).
- Puput Sari Puspita and Arfa'i Arfa'i, 'Analisis Terhadap Kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia', *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 3.1 (2023).<<https://doi.org/10.22437/limbago.v3i1.20115>>.
- Risnawati. (2021). Urgensi Penguatan Kelembagaan Bawaslu dalam Sistem Pemilu di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Rivai, M. (2020). *Analisis Yuridis Terhadap Efektivitas Bawaslu dalam Penegakan Hukum Pemilu*. Fakultas Hukum Universitas Riau.
- Santoso, B. (2023). Independensi dan Reformasi Bawaslu dalam Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Ilmu Hukum dan Kenegaraan*, 12(2).
- Suharno, T. (2021). *Integritas Pemilu dan Peran Bawaslu*. Bandung: Penerbit Hukum.
- Syaiful Mardani, *Lembaga Negara dan Kemandirian Bawaslu dalam Sistem Pemerintahan*, Yogyakarta: Penerbit Universitas, 2022.
- Taksil, A. Gunawan, 'Pengawasan Partisipatif Bawaslu Berbasis Digital Melalui Aplikasi Siwaslu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Bone', *Skripsi*, 1, 2024.
- Tambunan, M. T. (2020). Evaluasi Yuridis terhadap Peran Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu. *Skripsi*, Universitas Sumatera Utara, hlm. 57.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22E ayat (1) dan (2).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22E ayat (5).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 angka 22.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 1 angka 7, 8; Pasal 95 ayat (1) dan Pasal 99.
- Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024).
- Yani, R. (2022). Electoral Integrity and the Role of Bawaslu: A Normative Legal Review. *Jurnal Demokrasi dan Pemerintahan*, 8(1).